

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

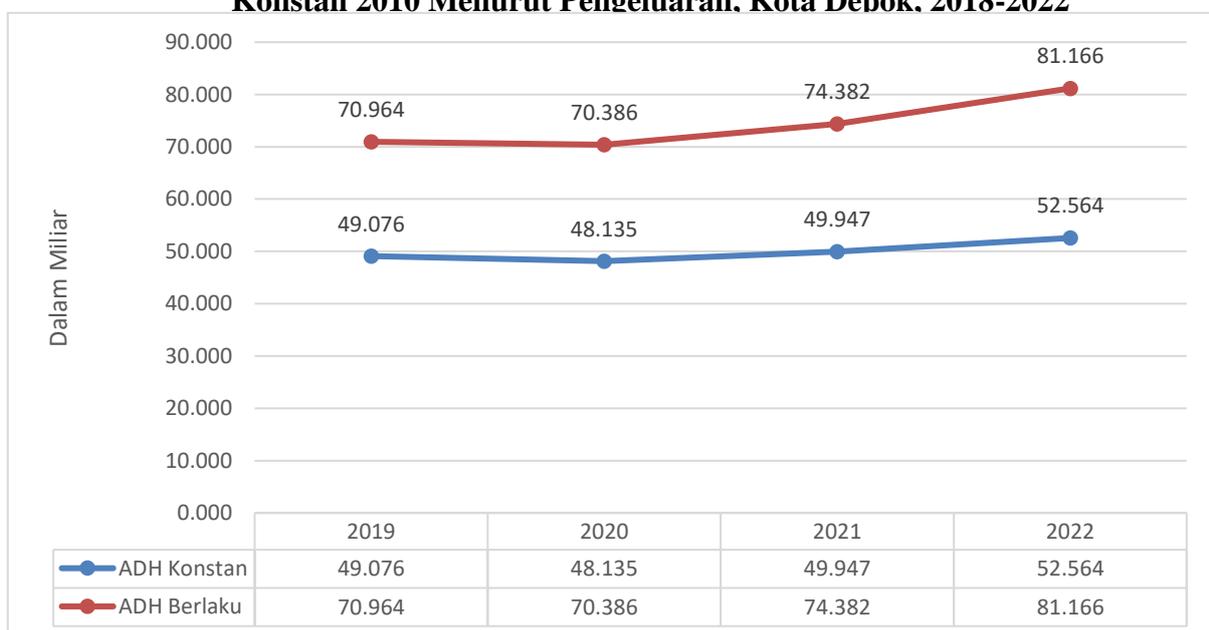
Pembangunan ekonomi menjadi salah satu dari berbagai aspek yang dimana jika kegiatan ekonomi berjalan dengan maksimal, maka diharapkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beragam, membuat Indonesia memiliki banyak potensi menjadi negara yang lebih maju. Di dalam sebuah proses pembangunan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan keterampilan yang tepat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan diharapkan jika meningkatnya kualitas SDM akan berpengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi negara. Namun, berdasarkan pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tingkat produktivitas di Indonesia masih rendah dan membutuhkan peningkatan keahlian atau *upscaling* SDM agar menghasilkan tenaga kerja yang terampil (Nababan, 2021).

Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak di banyak aspek kehidupan, termasuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan berbagai aspek lain. Salah satu sektor yang terdampak besar adalah ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi membuat pemerintah semakin optimis dalam mengeluarkan sejumlah kebijakan baru seraya membangun kembali landasan kerjasama untuk mencapai pemulihan yang menyeluruh. Dalam keberlangsungan kebijakan jangka panjang ini pemerintah pusat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai peran dari komunikator kepada masyarakat. Karena pemerintah daerah lebih memiliki pengetahuan tentang struktur ekonomi, demografi dan kondisi sosial penduduk daerah setempat. Dengan dukungan dari

pemerintah daerah, diharapkan bisa lebih meningkatkan efektivitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Luthfiana & Sugianti, 2022).

Pemerintah daerah diberikan kesempatan serta keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kota Depok yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota dengan letak strategis karena berbatasan langsung dan menjadi kota pendukung bagi Ibu Kota Jakarta serta Kota Depok termasuk di dalam kawasan perekonomian Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kota Depok sendiri terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan. Setelah era otonomi daerah, Kota Depok mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan pembangunan daerah. Pada tahun 2020 sampai 2022 jumlah penduduk di Kota Depok mencapai dua juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79%.

Gambar 1. 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022

Berdasarkan perspektif ekonomi makro, pertumbuhan dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. PDRB Konstan digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi riil tahun-ke-tahun,

yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dari gambar 1. 1 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2020 PDRB Kota Depok mengalami penurunan menjadi 48.135 miliar rupiah karena adanya pandemi dan di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 49,947 miliar Rupiah dan 52,565 miliar rupiah. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat dan penguatan kinerja perekonomian global mendorong perekonomian Kota Depok.

Pandemi yang tidak bisa dihindari ini mengakibatkan banyaknya perusahaan yang rugi serta banyak pekerja terdampak sehingga angka pengangguran juga meningkat (Fahri et al., 2020). Berwirausaha menjadi salah satu cara terbaik untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan diperlukannya upaya yang tepat untuk berinovasi agar dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada (Purwinarti & Chandra, 2020). Sektor UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi bangsa, terutama bagi ekonomi masyarakat setempat yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Para pelaku UMKM ini disebut penopang ekonomi rakyat kecil karena dengan keberadaannya berpotensi meningkatkan kehidupan masyarakat menengah bawah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Kota Depok berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 27,763 pekerja pada tahun 2021.

Tabel 1. 1 Kriteria Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

No	Jenis Usaha	Kriteria	
		Modal Usaha	Hasil Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks. 1 Miliar	Maks. 2 Miliar
2	Usaha Kecil	>1 Miliar – 5 Miliar	>2 Miliar – 15 Miliar
3	Usaha Menengah	>5 Miliar – 10 Miliar	>15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021, 2023

Dilihat pada tabel 1.1 diatas, kriteria usaha pada UMKM di Indonesia dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Sopiah, Kusumawati dan Wahyudi (2020) dalam penelitiannya berpendapat bahwa dilihat dari besarnya dampak UMKM terhadap perekonomian khususnya di Indonesia, individu jadi semakin aktif dan kreatif dalam memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan perusahaan sebagai hasil dari keberhasilan UMKM. Dengan besarnya dampak UMKM terhadap perekonomian di Indonesia, diharapkan program pemberdayaan UMKM dapat dijadikan salah satu strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan serta tantangan perekonomian.

Sektor UMKM di Indonesia saat ini semakin berkembang, salah satunya di Kota Depok yang peluangnya sangat menjanjikan. Mencapai angka 15%, survei pada internal pelaku UMKM mengungkap hal tersebut dimana indikasinya mencakup hal-hal seperti pertumbuhan pelaku usaha dan pendapatan. Tiga industri unggulan di Depok adalah Industri fashion, kerajinan, dan makanan (Pusporini, 2020). Pembatasan sosial yang diterapkan di tahun 2020, membuat banyak pelaku usaha yang mulai memakai berbagai *platform* digital sebagai sarana pemasaran. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi terkini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran produk UMKM (Arifqi, 2021). Namun dilihat dari penelitian diatas, dalam pelaksanaan UMKM tentunya ada beberapa kendala-kendala umum yang dihadapi oleh pelaku usaha. UMKM selalu menghadapi masalah yang sama ketika melakukan bisnis, seperti yang melibatkan pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Hal ini disebut sebagai kesulitan klasik karena hal serupa sering terjadi di hampir semua UMKM, baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru (Widyastuti & Parianom, 2022). Masih banyaknya juga UMKM di Depok yang belum efektif mengembangkan branding produknya (Listya & Rukiah, 2018). Dilihat dari penelitian diatas, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mengerti tentang ilmu-ilmu usaha. Dengan program pemberdayaan UMKM

yang didalamnya termasuk program pembinaan diharapkan dapat mengatasi banyak permasalahan dari pra-produksi hingga pemasaran.

Sebagai salah satu pilar fundamental perekonomian nasional, UMKM membutuhkan akses yang seluas-luasnya terhadap kemungkinan, dukungan, perlindungan, dan pertumbuhan agar sejalan dengan perekonomian rakyat dan dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan untuk mendorong perkembangan UMKM di Kota Depok dan sehingga mampu menguasai pangsa pasar guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang UMKM, pada Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri.

Merupakan penyatuan dari pembangunan perekonomian nasional, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk memperluas dan melaksanakan pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja (Budiyanto & Effendy, 2020). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) menjelaskan beberapa kegiatan yang diterapkan DKUM Kota Depok dalam program pemberdayaan UMKM ialah program pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan kegiatan ini, sasaran dari program pemberdayaan UMKM ini ialah meningkatnya daya saing Usaha Mikro dengan peningkatan presentase Wirausaha Baru. Salah satu program unggulan pada tahun 2022-2024 ialah Program 5000 Wirausaha Baru dan 1000 Perempuan Pengusaha (Aditya, 2022).

Menjadi kecamatan dengan pendaftar terbanyak, Kecamatan Bojongsari mengumpulkan 587 pendaftar (Zakaria, 2022). Namun, berdasarkan wawancara pra-penelitian dan observasi di Kecamatan Bojongsari, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Dari pelatihan yang diadakan, masih ada pelaku

UMKM yang tidak bisa mengikuti karena adanya tumpang tindih dengan proses produksi. Pelaku UMKM di Kecamatan Bojongsari masih memakai *WhatsApp* sebagai bentuk promosi dan belum tertarik pemasaran lewat platform yang lebih luas. Peminat untuk usaha di bidang *craft* dan *fashion* juga masih kurang. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok melaksanakan pemberdayaan demi berkembangnya UMKM di Kota Depok. Berdasarkan data-data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut identifikasi masalahnya:

1. Pelatihan yang terhambat proses produksi
2. Pelaku UMKM yang belum tertarik *digitalisasi* produk
3. Kurangnya peminat di bidang *craft* dan *fashion*
4. Promosi yang belum maksimal

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun Batasan masalah dari judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok” hanya fokus pada usaha mikro di Kecamatan Bojongsari yang mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kegiatan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok?
2. Apa faktor pendukung serta penghambat efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan bahan referensi atau landasan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat digunakan dalam meningkatkan ilmu yang di dapat selama menempuh pendidikan Ilmu Administrasi Publik terutama berhubungan dengan teori efektivitas program.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi berbentuk solusi dalam meningkatkan penerapan program pemberdayaan UMKM di Kota Depok

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi terkait program pemberdayaan UMKM